

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Masalah pengangguran menjadi salah satu isu utama yang belum juga terselesaikan. Sampai hari ini, pengangguran tetap menjadi persoalan serius karena dipicu oleh banyak faktor yang saling berkaitan. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini bisa memicu berbagai masalah sosial dan memperparah angka pengangguran terbuka di masyarakat.

Biasanya, pengangguran yang meluas terjadi karena jumlah tenaga kerja yang tersedia tidak sebanding dengan lapangan kerja yang ada. Ketidakseimbangan antara aspek penawaran dan permintaan baik kuantitas maupun kualitas dapat menimbulkan akibat serius terhadap pengangguran (Nisa, K., & Sugiharti, 2002)). Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil juga ikut memperburuk situasi. Ketika ekonomi melambat, kesempatan kerja pun ikut menyempit. Inilah mengapa isu pengangguran harus menjadi perhatian utama dalam pembangunan ekonomi negara. Upaya untuk menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat sektor ketenagakerjaan perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi agar bisa memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Pengangguran terbuka merupakan salah satu permasalahan ekonomi dan sosial yang hingga kini masih menjadi perhatian serius di berbagai wilayah Indonesia. Keberadaan pengangguran yang tinggi dapat mencerminkan tidak optimalnya kinerja pasar tenaga kerja, serta menjadi indikator ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Selain berdampak terhadap kesejahteraan individu, pengangguran juga memiliki implikasi luas terhadap produktivitas daerah dan stabilitas sosial.

DKI Jakarta sebagai ibu kota negara sekaligus pusat kegiatan ekonomi nasional seharusnya memiliki kemampuan lebih dalam menyediakan lapangan kerja bagi penduduknya. Namun, kenyataannya tidak demikian.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per Agustus 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DKI Jakarta mencapai 6,53% yang lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 4,91%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Tingginya angka pengangguran ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah lapangan kerja baru yang tersedia dan arus masuk pendatang ke kota ini. Akibatnya, terjadi lonjakan jumlah penduduk hingga mencapai 11.135.191 jiwa pada tahun 2024. Pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang meningkat secara signifikan setiap tahun tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja. Ketidakseimbangan ini, tanpa disertai penciptaan peluang kerja baru, berakibat pada peningkatan jumlah pengangguran (Lidiya Rima Ranti et al., 2024).

Salah satu penyebabnya adalah adanya kesenjangan antara laju pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2023, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tumbuh sebesar 4,96%, namun sektor-sektor yang berkembang cenderung didominasi oleh industri berbasis teknologi dan jasa keuangan, yang mensyaratkan keterampilan tinggi. Akibatnya, tidak semua pencari kerja terutama yang berasal dari kelompok berpendidikan menengah kebawah, dapat terserap ke dalam sektor tersebut.

Sealin itu, tingkat partisipasi angkatan kerja di DKI Jakarta juga cenderung tinggi, yaitu mencapai 65,21% per Agustus 2023. Tingginya TPAK menandakan bahwa mayoritas penduduk usia kerja aktif mencari atau sudah mendapatkan pekerjaan. Namun, jika pertumbuhan kesempatan kerja tidak sejalan dengan peningkatan partisipasi angkatan kerja, maka kelebihan tenaga kerja akan berujung pada meningkatnya angka pengangguran terbuka.

Faktor lain yang turut memengaruhi dinamika pasar kerja di DKI Jakarta adalah upah minimum provinsi. Pada tahun 2023, UMP DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp. 4.901.798. walaupun kenaikan upah minimum provinsi bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja, dalam realitanya justru menjadi beban bagi sektor usaha kecil dan menengah yang belum mampu menyesuaikan

struktur biaya produksinya. Hal ini dapat menurunkan kemampuan perusahaan untuk merekrut tenaga kerja baru, dan bahkan memicu pengurangan tenaga kerja di beberapa sektor.

Berdasarkan *kompleksitas* permasalahan tersebut, DKI Jakarta dipandang sebagai wilayah yang relevan untuk dikaji secara lebih mendalam dalam konteks tingkat pengangguran terbuka. Di samping sebagai pusat ekonomi nasional, DKI Jakarta juga merupakan indikator kebijakan nasional, serta memiliki akses data statistik yang lengkap dan konsisten dari berbagai lembaga resmi. Fenomena tingginya pengangguran di tengah laju pertumbuhan ekonomi dan tingginya TPAK menjadikan Jakarta sebagai lokasi penelitian yang strategis untuk memahami dinamika ketenagakerjaan.

Pengangguran terjadi ketika seseorang yang sebenarnya siap dan aktif mencari pekerjaan, tetapi belum juga menemukan pekerjaan yang sesuai dengan harapan dan kemampuannya (Sambaulu et al., 2022). Situasi ini bukan hanya menyangkut soal tidak adanya pekerjaan, tapi juga soal kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang dihadapi para pencari kerja. Ketika tingkat pengangguran tinggi, tidak sedikit orang yang akhirnya merasa putus asa. Setelah sekian lama mencari pekerjaan mencari pekerjaan tanpa hasil, sebagian dari mereka mulai kehilangan harapan dan berhenti mencari kerja sama sekali. Ironisnya, hal ini bisa membuat angka pengangguran tampak menurun atau setidaknya tidak meningkat padahal kenyataannya, kondisi di pasar tenaga kerja belum benar-benar membaik. Artinya, penurunan tingkat pengangguran terbuka bisa saja terjadi meski kondisi di pasar tenaga kerja belum membaik (Anjali Puspita Sari, 2019).

Berbagai upaya terus dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran, termasuk oleh Dinas Tenaga Kerja, *Transmigrasi* dan *Energi (DTKTE)* Provinsi DKI Jakarta. Salah satu langkah yang diambil adalah menyebarkanluaskan informasi tentang pasar kerja secara *offline*, seperti melalui bursa kerja atau *job fair*, maupun secara digital lewat media sosial dan situs web resmi. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih mudah mengakses informasi lowongan kerja yang sesuai dengan keahlian mereka. Tak hanya

itu, *DTKTE* juga menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan untuk memahami keterampilan apa saja yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk menyusun pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.

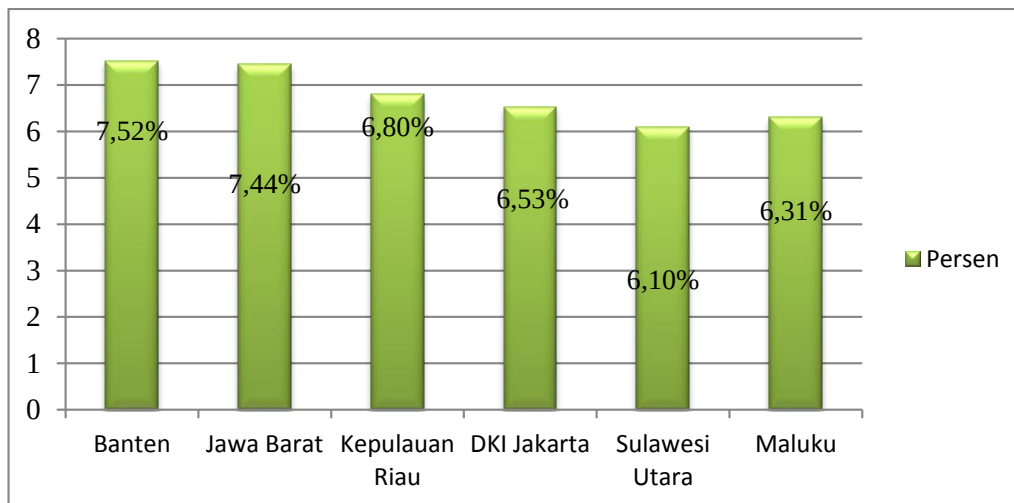
Guna meningkatkan kualitas tenaga kerja, *DTKTE* secara rutin memperbarui kurikulum pelatihan agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Mereka juga menyediakan fasilitas seperti Balai Latihan kerja (*BLK*) atau Pusat Pelatihan Kerja (*PKK*) sebagai *UPT* (Unit Pelaksana Teknis) dibawah *Disnakertransgi*, di tempat inilah berbagai pelatihan berbasis kompetensi dilaksanakan, dengan tujuan utama membantu peserta agar lebih siap dan cepat terserap ke dunia industri.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Hartanto, 2017), pengangguran bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga memengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan. Pengangguran dapat menyebabkan turunnya kesejahteraan, menurunnya produktivitas, dan berkurangnya pendapatan masyarakat. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa memicu masalah lain seperti kemiskinan, meningkatnya angka kriminalitas, hingga berbagai persoalan sosial lainnya.

Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi dapat menjadi tantangan serius, karena berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengangguran memang merupakan isu yang terus menjadi fokus dalam upaya perbaikan ekonomi di Indonesia. Selain itu, kondisi ekonomi yang sering kali tidak stabil justru memperburuk situasi, karena kebijakan yang diterapkan dalam kondisi demikian cenderung menghasilkan efek yang tidak diharapkan dalam mendorong pencapaian ekonomi yang lebih baik (Kustono & Effendi, 2016).

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih menghadapi permasalahan pengangguran yang berlangsung selama bertahun-tahun, sebagaimana yang juga dialami oleh negara berkembang lainnya. Tingkat pengangguran di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Kondisi serupa juga terjadi di berbagai daerah, termasuk di Provinsi DKI Jakarta, yang tercatat

sebagai wilayah dengan tingkat pengangguran terbanyak keempat di Indonesia. Di bawah ini adalah diagram dengan tingkat pengangguran tertinggi di beberapa Provinsi yang ada di Indonesia tahun 2010-2023:



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia 2024

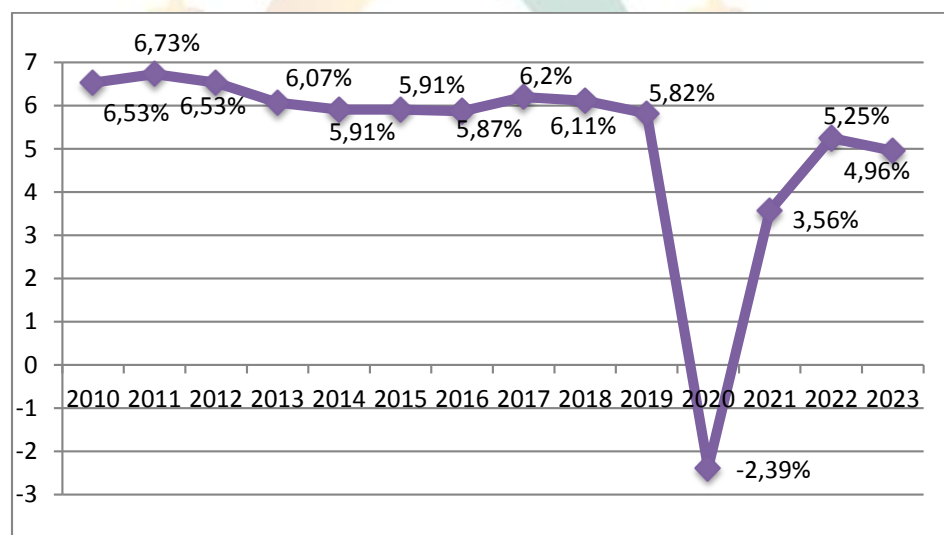
Gambar 1. 1 Tingkat Pengangguran Terbuka di 7 Provinsi di Indonesia Tahun 2023

Data pada gambar 1.1 adalah data yang bersumber dari Badan pusat Statistik (BPS) yang menjelaskan bahwa Provinsi Banten termasuk dalam tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia sebesar 7,52% di tahun 2023. Diikuti Provinsi Jawa Barat dan Kepulauan Riau dengan tingkat pengangguran masing-masing sebesar 7,44% dan 6,80%. Provinsi DKI Jakarta juga termasuk tingkat pengangguran tertinggi sebesar 6,53%, ini disebabkan karena perbandingan antar tingginya pengangguran dan kesempatan kerja yang tidak seimbang. Dampak dari Covid 19 pada tahun 2020 juga menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya pengangguran di DKI Jakarta yang masih dirasakan hingga sekarang walaupun ekonomi perlahan sudah mulai memulih.

Pada tahun 2023, angka pengangguran terbuka di angka 6,53% yang artinya mengalami penurunan sebesar 0,65% dari tahun sebelumnya, tetapi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta masih di atas angka tingkat pengangguran terbuka nasional yaitu sebesar 4,82% per Februari

2024. Maka tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta masih dikategorikan tinggi.

Pengangguran merupakan isu yang rumit karena dipengaruhi oleh berbagai indikator. Salah satu indikator ekonomi yang berperan dalam memengaruhi tingkat pengangguran adalah laju pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami peningkatan, maka jumlah pengangguran diharapkan dapat berkurang. Masalah pengangguran juga menjadi elemen penting dalam mencerminkan kondisi ekonomi di suatu wilayah. Upaya penanggulangan pengangguran dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya terlihat dari naiknya pendapatan per kapita (Silaban dkk, 2020)



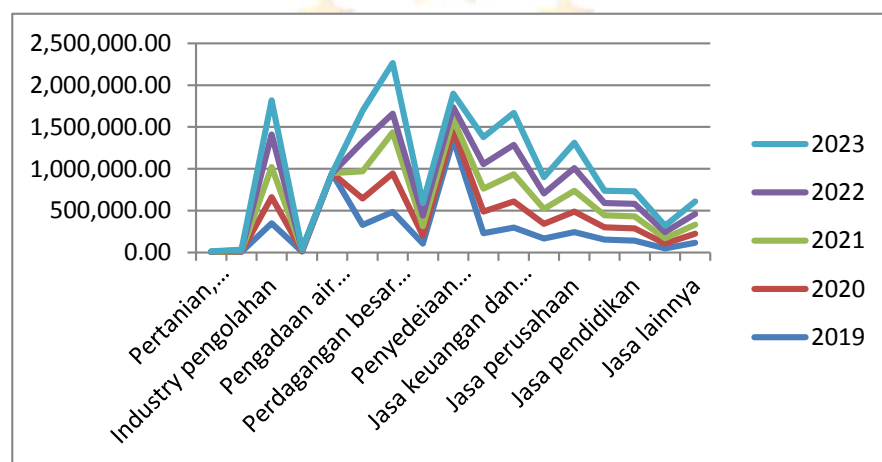
Sumber: Badan Pusat Statistik 2024

Gambar 1. 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010-2023

Pada gambar 1.2 menjelaskan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta, mengalami fluktuatif atau naik turun di setiap tahunnya. dimana laju pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2011 mencapai 6,73% dan laju pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar -2,39%. Hal ini disebabkan dari dampak Covid-19 yang melanda seluruh Provinsi di Indonesia termasuk Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, di tahun 2021-2023 mengalami perbaikan laju pertumbuhan

ekonomi yang cukup baik dengan meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Laju pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator utama dalam mengevaluasi performa suatu perekonomian, khususnya dalam menganalisis sejauh mana pembangunan ekonomi telah berhasil dilaksanakan oleh suatu negara atau wilayah. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila terjadi peningkatan dalam jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dibandingkan dengan periode sebelumnya.



Sumber : Badan Pusat Statistik 2024

Gambar 1. 3 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)

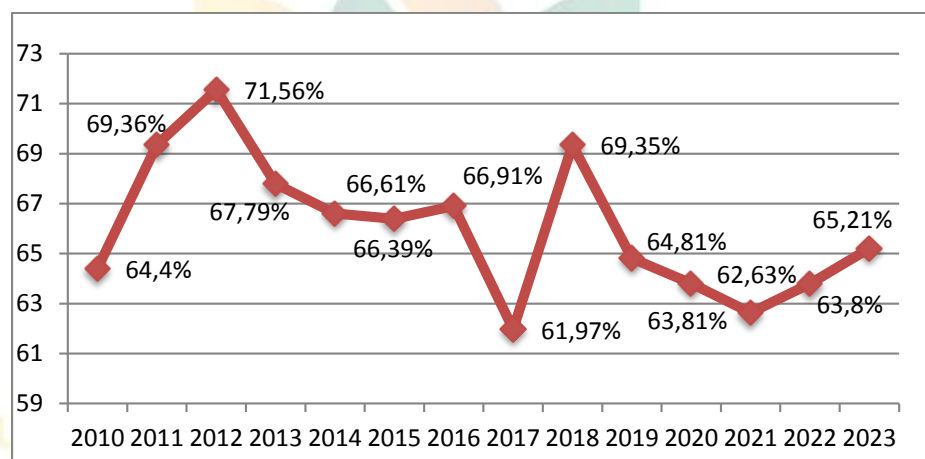
Gambar 1.3 adalah data PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku menunjukkan bahwa sektor tersier seperti perdagangan, transportasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan, jasa pendidikan, jasa kesehatan masih menjadi tumpuan utama perekonomian Jakarta. Menyumbang rata-rata 76,16 persen dari tahun 2019 hingga 2023.

Diikuti oleh sektor sekunder yang mencakup industri pengolahan, pengadaan listrik, gas, air dan konstruksi yang menyumbang sebesar 23,55 persen, serta sektor primer meliputi pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan penggalian yang menyumbang sebesar 0,28 persen. Sektor tersier merupakan sektor lapangan usaha yang menghasilkan produk berupa jasa atau produk tidak berwujud yang mengandalkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh manusia untuk menyediakan produk jasa.

Dominasi sektor tersier diiringi dengan produktivitas sektor tersier yang tinggi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh (R. Kurniawan et al., 2021) membuktikan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Dengan kata lain, setiap peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah cenderung diikuti oleh penurunan jumlah pengangguran terbuka. Temuan serupa juga disampaikan oleh (Wardiansyah et al., 2016), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu menekan angka pengangguran.

Selain itu, tingkat partisipasi angkatan kerja juga merupakan faktor penting yang memengaruhi pengangguran (Salsabila et al., 2022). Dalam konteks kegiatan ekonomi, tenaga kerja memegang peran yang sangat penting karena berfungsi sebagai penggerak utama dalam proses produksi. Bahkan, tenaga kerja kerap dianggap lebih esensial dibandingkan dengan alat produksi itu sendiri karena keberadaannya sangat menentukan kemajuan atau kemunduran suatu daerah.



Sumber: Badan Pusat Statistik 2024

Gambar 1. 4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Dari gambar 1.4 terlihat adanya perubahan pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi DKI Jakarta dari tahun ke tahun, TPAK tercatat paling tinggi berada pada tahun 2012, yaitu sebesar 71,56%. Selanjutnya turun sebesar 61,97% di tahun 2017 dan meningkat kembali

sebesar 69,35% pada tahun 2018. Ini di buktikan dengan menurunnya tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta sebesar 0,09% poin dari 7,14% di tahun 2017 menjadi 6,24% di tahun 2018 (Badan Pusat Statistik, 2018). Selanjutnya sepanjang tahun 2019-2023, TPAK di DKI Jakarta terus mengalami fluktuasi. Perubahan ini antara lain dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah banyaknya pendatang dari luar DKI Jakarta.

Pertambahan jumlah angkatan kerja dari tahun ke tahun diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (Maulina & Andriyani, 2020). Pandangan ini sejalan dengan pendapat (Mirah et al., 2020) yang menyatakan bahwa tenaga kerja merupakan modal dalam menggerakkan roda pembangunan. Dalam konteks dinamika demografi, jumlah serta struktur angkatan kerja akan terus mengalami perubahan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi perlu diiringi dengan ketersediaan tenaga kerja, baik yang memiliki keterampilan maupun yang belum terampil, serta perlu didukung oleh upaya untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan lapangan kerja.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2023), TPAK merupakan indikator yang mengukur *proporsi* penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar kerja, baik mereka yang sedang bekerja maupun yang tengah mencari pekerjaan. Indikator ini memberikan gambaran relatif mengenai ketersediaan tenaga kerja yang siap terlibat dalam proses produksi barang dan jasa. Menurut (Maulina & Andriyani, 2020), peningkatan TPAK mencerminkan tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bekerja, yang juga dapat menjadi indikator meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Lebih jauh lagi, kenaikan TPAK juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk keberhasilan pembangunan ekonomi.

TPAK menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu di suatu wilayah. TPAK mengacu pada perbandingan antara jumlah penduduk penduduk yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan dengan keseluruhan penduduk usia kerja. Sementara itu, kelompok kerja mencakup individu yang telah terserap oleh

permintaan tenaga kerja, baik mereka yang bekerja penuh, menganggur, maupun yang bekerja secara tidak penuh (setengah menganggur).

(Mulyadi, 2019), mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja, maka secara umum hal tersebut dianggap positif. Namun demikian, hal ini hanya berlaku apabila peningkatan tersebut sejalan dengan naiknya jumlah penduduk yang bekerja. Sebaliknya, apabila kenaikan partisipasi angkatan kerja tidak diiringi dengan peningkatan kesempatan kerja, maka hal itu justru berpotensi menambah jumlah pengangguran akibat keterbatasan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang tersedia.

Sementara itu, upah yang relatif tinggi dapat menarik minat lebih banyak pencari kerja karena dianggap mampu memberikan jaminan penghasilan yang layak. Meski demikian, kondisi ini bisa berdampak berbeda bagi pihak perusahaan. Ketika terjadi kenaikan upah minimum, perusahaan mungkin memilih untuk mengurangi perekrutan tenaga kerja dan lebih mengandalkan teknologi atau mesin yang dinilai lebih efisien dan produktif.

Salah satu faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka adalah kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) (Prawira, 2018). UMP merupakan batas upah terendah yang harus dibayarkan oleh pengusaha atau pelaku industri kepada tenaga kerjanya, baik itu karyawan, buruh, maupun pegawai, sesuai dengan ketentuan di wilayah kerjanya (Fahira & Andriyani, 2022). Terkait hubungan UMP dan pengangguran Kaufman dan Hotchkiss dikutip dalam (Prawira, 2018) menyatakan bahwa semakin tinggi upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, maka berpotensi menurunkan jumlah penduduk yang bekerja, karena tidak semua pelaku usaha mampu menyesuaikan diri dengan beban biaya tersebut.

Untuk menggambarkan perkembangan Upah Minimum Provinsi (UMP) di DKI Jakarta dalam beberapa tahun terakhir, dapat disajikan melalui tabel berikut:

Tabel 1. 1 Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010-2023

No	Tahun	Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta (Rupiah)
1.	2010	1.118.000
2.	2011	1.290.000
3.	2012	1.529.150
4.	2013	2.200.000
5.	2014	2.441.000
6.	2015	2.700.000
7.	2016	3.100.000
8.	2017	3.355.750
9.	2018	3.648.036
10.	2019	3.940.973
11.	2020	4.267.349
12.	2021	4.416.187
13.	2022	4.573.845
14.	2023	4.901.798

Sumber: Badan Pusat Statistik 2024

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan kondisi upah minimum Provinsi DKI Jakarta yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sebagai kota metropolitan, upah minimum yang ditetapkan pada Provinsi DKI Jakarta masih tergolong rendah di Indonesia. Upah yang ditetapkan pada tahun 2014 sebesar Rp 2.441.000.00 perbulan, sampai pada tahun 2023 upah minimum yang ditetapkan terus meningkat menjadi sebesar Rp 4.901.798.00 perbulan.

Upah Minimum Provinsi adalah gaji untuk pegawai di lingkungan kerjanya yang kemudian digunakan usahawan untuk dijadikan upah sesuai standar minimum yang digunakan (BPS, 2016). Setiap kenaikan tingkat upah

akan menyebabkan meningkatnya pengangguran. Sebaliknya, apabila tingkat upah turun maka akan diikuti oleh meningkatnya penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap mempunyai hubungan timbal balik dengan tingkat upah.

Upah mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang ada. Sehubungan dengan itu, jika upah yang ditetapkan tinggi, maka biaya produksi akan semakin meningkat. Akibatnya, perusahaan melakukan efisiensi dengan cara pengurangan tenaga kerja dan berakibat pada bertambahnya jumlah pengangguran.

Menurut pendapat keynes, pengangguran tidak disebabkan oleh rendahnya produksi, melainkan oleh lemahnya permintaan agregat. Dalam pandangan ini, pertumbuhan ekonomi terhambat karena tingkat konsumsi masyarakat yang rendah. Keynes menilai bahwa mekanisme pasar tidak mampu menyelesaikan masalah ini secara otomatis. Ketika jumlah tenaga kerja meningkat dan upah menurun, kondisi tersebut justru berdampak negatif karena melemahnya daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Akibatnya, produsen mengalami penurunan keuntungan dan tidak mampu menyerap tenaga kerja secara optimal (Mahroji & Nurkhasanah, 2019). Sedangkan pada kenyataannya di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan permintaan agregat yang tinggi dengan melihat pertumbuhan ekonomi yang selalu meningkat disetiap tahunnya. Namun, kondisi ini masih membuat Provinsi DKI Jakarta tergolong dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia, mencapai 6,53% dengan rata-rata nasional yang hanya sebesar 4,82%.

Berdasarkan uraian di atas, pengangguran merupakan suatu ukuran dari keberhasilan pembangunan ekonomi. Pengangguran dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya laju pertumbuhan ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum Provinsi. Maka penulis tertarik menganalisis lebih lanjut masalah tersebut dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG**

MEMPENGARUHI TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2010- 2023”

Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di DKI Jakarta dengan menitikberatkan pada variabel laju pertumbuhan ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum provinsi. Research gap pada penelitian ini terletak pada pengaruh perbedaan variabel. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda terkait pengaruh variabel seperti pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan pendidikan terhadap tingkat pengangguran. Misalnya, ada penelitian yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran sementara penelitian lain menunjukkan sebaliknya. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpastian dan variasi dalam hasil penelitian yang ada menjadi dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Banyak penelitian sebelumnya mungkin tidak secara *spesifik* meneliti pengaruh faktor-faktor tersebut di DKI Jakarta, yang merupakan salah satu provinsi dengan dinamika ekonomi dan sosial yang unik di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada konteks lokal yang mungkin memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Penelitian ini mencakup periode waktu dari 2010 hingga 2023, yang mungkin belum banyak diteliti dalam konteks pengangguran terbuka di DKI Jakarta. Dengan mempertimbangkan periode yang lebih baru, penelitian ini berusaha untuk memberikan wawasan yang lebih relevan dan terkini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Tingginya angka tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta yang melebihi angka nasional, sehingga menduduki Provinsi dengan TPT tertinggi ke-4 se Indonesia.
2. Banyaknya pendatang dari luar DKI Jakarta yang bersaing dengan penduduk asli, tetapi tidak diseimbangi dengan lapangan kerja yang cukup.
3. Tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan.
4. Upah minimum Provinsi yang tinggi belum mampu mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta.

C. Pembatasan Masalah

Sebagaimana latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya batasan masalah ini hanya fokus pada Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka, yang dimana objek penelitian ini ialah Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian batasan wilayah pada penelitian adalah :

1. Pengaruh laju pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta tahun 2010-2023.
2. Pengaruh upah minimum provinsi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta tahun 2010-2023.
3. Pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta tahun 2010-2023.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta tahun 2010-2023?
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta tahun 2010-2023?

3. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta tahun 2010-2023?
4. Bagaimana pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Upah Minimum Provinsi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta tahun 2010-2023?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk memastikan bahwa materi dan pembahasannya sesuai dengan fokus yang ditetapkan serta mempermudah pelaksanaan kegiatan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta tahun 2010-2023.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta tahun 2010-2023.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta tahun 2010-2023.
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Upah Minimum Provinsi secara bersama-sama terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta tahun 2010-2023.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat bagi :

- a. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman, bahan referensi atau acuan melengkapi kajian yang berkaitan tentang pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja,

dan upah minimum provinsi terhadap pengangguran di Provinsi DKI Jakarta.

- b. Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi :
 - 1) Mahasiswa, sebagai sarana untuk menambah wawasan dan memperdalam pemahaman terkait persoalan pengangguran di Provinsi DKI Jakarta.
 - 2) Investor atau pelaku usaha, sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan penyerapan tenaga kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran di wilayah tersebut.
 - 3) Masyarakat umum, agar dapat menambah wawasan serta memahami persoalan dan solusi terkait pengangguran di Provinsi DKI Jakarta.
- c. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan masukan atau referensi bagi pemerintah dan pemilik usaha dalam merumuskan langkah-langkah untuk menanggulangi pengangguran serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan terdiri dari lima bab. Masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI, memuat pembahasan mengenai pengangguran, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Upah Minimum Provinsi.

BAB III METODE PENELITIAN, menjelaskan mengenai jenis penelitian, jenis dan sumber data, definisi dan operasional variabel, metode dan teknik analisis data, pengujian hipotesis, serta uji T dan uji F.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN, berisi tentang hasil penelitian, pembagian pembahasan sesuai dengan pendekatan, keadaan penelitian dan tujuan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, berfungsi sebagai penutup yang menrangkum hasil dari pengujian hipotesis, memberikan gambaran umum atas temuan penelitian, serta menyampaikan saran untuk penelitian di masa mendatang.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON